

## **EVALUASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA SITUS KOPERTIS WILAYAH VI JAWA TENGAH**

**Nova Rijati<sup>1\*</sup>, Budi Widjajanto<sup>2</sup>, Dewi Agustini Santoso<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup> Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro  
Jl. Nakula I No. 5-11, Semarang 50131

<sup>2</sup> Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro  
Jl. Nakula I No. 5-11, Semarang 50131

\*Email: novaola@yahoo.com

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan mengevaluasi layanan informasi publik berbasis teknologi informasi pada Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah berdasarkan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Metode penelitian yang digunakan dengan melakukan kajian dan evaluasi terhadap layanan informasi publik berbasis teknologi informasi pada situs Kopertis Wilayah VI, kemudian memetakan konten informasi pada menu /sub menu berdasarkan Permendiknas No 50 tahun 2011 tentang layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan menentukan konten informasi publik yang sesuai UU No 14/2008. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dari 58 item informasi publik yang harus disediakan, ternyata hanya terdapat 17 item (29%) sehingga masih terdapat 71% item informasi publik yang belum tersedia, serta sifat situs [www.kopertis6.or.id](http://www.kopertis6.or.id) dalam memberikan layanan informasi publik masih sebatas menampilkan, namun belum memberikan layanan yang bersifat interaktif.*

**Kata kunci:** informasi publik, situs, Kopertis Wilayah VI

### **1. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam bidang pendidikan telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementrian dan Kebudayaan, yang sejalan dengan salah satu agenda reformasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik (Effendi, 2009).

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang tugas pokoknya antara lain melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan perguruan tinggi swasta tentunya tidak luput dari kewajiban untuk menyediakan layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2011 pasal 19 ayat (1) yang berbunyi "Penyajian informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, secara serta merta dan tersedia setiap saat dapat disajikan dalam bentuk *soft copy*, *hard copy* dan laman resmi Kementerian/Perguruan Tinggi Negeri/Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta/Unit Pelaksana Teknis".

Salah satu strategi dalam meningkatkan layanan pada situs pemerintah melalui empat tahap pengembangan yaitu katalogisasi, transaksi, integrasi vertikal, integrasi horisontal. (Heng, Jinchang, 2010). Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik telah diimplementasikan pada beberapa negara maju. *United Nations E-Government Survey Releases 2012* menempatkan Indonesia pada peringkat ke 7 dari 11 negara di Asia Tenggara dibawah Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, Philipina dan Thiland (United Nation, 2012).

Keberhasilan *e-Government* Pemerintah Singapura ditopang oleh empat komponen utama, yaitu isi informasi, infrastruktur ICT, infrastruktur *e-government*, dan promosi *e-government* (Chan, Lau, Pan, 2008). Konsep penyajian informasi publik harus dilakukan dengan cara yang logis, konsisten, koheren dan mudah diakses sehingga setiap pengguna, meskipun tanpa pengetahuan internet memadai sekalipun, dapat memperoleh informasi serta menggunakan layanan *on-line* (Banciu, 2009). Kanal informasi *e-Government* yang terbaik merupakan situs pemerintah yang informatif, komprehensif dan efektif, terintegrasi dengan kuat, mampu memuat informasi yang luar biasa besar, menyediakan fitur yang lengkap dan memanfaatkan semua teknologi

informasi dan komunikasi. Hal ini dikemukakan oleh (Sutrisno, Istiyanto, 2009) dalam penelitiannya yang berjudul Portal-Portal *e-Government* Terbaik Di Dunia.

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI, yang berkedudukan di Semarang serta mempunyai wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah memiliki situs resmi yang beralamatkan: <http://www.kopertis6.or.id> dan beroperasi mulai bulan Maret 2011, sampai sekarang telah dikunjungi oleh lebih dari 600.000 (enam ratus ribu) pengunjung, hal ini menunjukkan bahwa minat serta keingintahuan masyarakat terhadap Kopertis VI cukup tinggi, sehingga tentunya harus direspon dengan selalu meng-update informasi serta meningkatkan layanan melalui situs tersebut.

Sebagai salah satu badan publik bidang pendidikan Kopertis VI wajib menyediakan akses dan layanan informasi publik sesuai amanah UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap situs [www.kopertis6.or.id](http://www.kopertis6.or.id) yang terkait dengan ketentuan undang-undang tersebut serta memelihara informasi dan membuat informasi tersebut mudah diakses melalui suatu sistem yang terkomputerisasi yang disebut sistem basis data (Date, 1981) yang harus memenuhi sifat unik, standar, lengkap, permanen, dan terintegrasi (Sutanta, 2011).

## 2. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *action research*. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah : 1) mengidentifikasi kondisi layanan publik pada website Kopertis Wilayah VI (<http://www.kopertis6.or.id>), dengan cara studi pustaka dan dokumentasi sehingga dapat disusun suatu kuesioner yang menghasilkan data-data layanan informasi publik di PTS Kopertis Wilayah VI serta dengan diskusi terarah dengan pihak Kopertis, beberapa PTS, Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah serta pihak-pihak lain yang berkompeten, 2) memetakan layanan informasi publik pada PTS, dengan cara observasi situs Kopertis Wilayah VI. Observasi dilakukan untuk membuat peta situs (sitemap) serta jenis layanan yang disediakan melalui situs tersebut serta melakukan pemetaan terhadap konten informasi serta layanan situs Kopertis Wilayah VI terhadap ketersediaan informasi publik sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2011. Ketersediaan informasi publik yang dimaksud adalah : informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik secara berkala, informasi yang wajib disampaikan secara merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Setelah itu dilakukan analisis komparasi hasil observasi dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil

Hasil observasi yang dilakukan terhadap situs Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah (<http://www.kopertis6.or.id>), menghasilkan peta situs seperti pada tabel 1

**Tabel 1. Peta situs Kopertis Wilayah VI**

No	Nama Menu	Kode	Jumlah Sub Menu	No	Nama Menu	Kode	Jumlah Sub Menu
1	Menu Utama	A	6	11	SK Inpassing	K	1
2	Directory	B	10	12	e-Jurnal Dikti	L	3
3	Community	C	2	13	Arsip Artikel	M	5
4	Materi Pelatihan	D	1	14	Panduan	N	4
5	Buku Profile	E	1	15	Links	O	11
6	e-Jurnal Kopertis	F	5	16	Info Legalisir	P	1
7	Jurnal PTS Jateng	G	1	17	Beasiswa Dosen	Q	2
8	Digilib PTS Jateng	H	1	18	Profil PNS	R	1
9	Situs PTS Jateng	I	1	19	Media Dikti	S	1
10	Tracer Studi Dikti	J	2				

Sedangkan hasil pemetaan konten/jenis informasi publik pada menu/sub menu situs Kopertis Wilayah VI yang sesuai dengan Permendiknas No 50 tahun 2011 tentang layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersaji dalam tabel 2.

**Tabel 2. Jenis Informasi Publik sesuai Permendiknas No 50 tahun 2011**

No	Jenis Informasi	Sub Jenis	Jumlah
1	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	- Informasi profil badan publik	3
		- Ringkasan informasi program/kegiatan	9
		- Ringkasan informasi kinerja badan publik	1
		- Ringkasan informasi keuangan	4
		- Ringkasan laporan akses informasi publik	4
		- Informasi peraturan, keputusan, kebijakan yang berdampak pada publik	2
		- Informasi tentang hak dan tata cara mengakses informasi publik	1
		- Informasi tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran pejabat	1
		- Informasi pengadaan barang dan jasa	1
		- Informasi prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat	1
2	Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta		1
3	Informasi yang wajib tersedia setiap saat		16
4	Daftar informasi publik		7
5	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan unit kerja di lingkungan PPID		6
6	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan		6

### 3.2. Pembahasan

Untuk dapat mengevaluasi sejauh mana suatu badan publik telah memanfaatkan situs sebagai sarana penyampaian dan menyediakan layanan informasi publik sesuai ketentuan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yakni :

1. Konten informasi publik pada situs
2. Layanan yang disediakan oleh situs

#### 3.2.1 Konten Informasi Publik

Konten informasi publik pada suatu situs Kopertis Wilayah VI, dapat dilihat dengan cara memetakan konten informasi pada menu /sub menu berdasarkan Permendiknas No 50 tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Konten informasi publik sesuai UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik secara berkala.
2. Informasi yang wajib disampaikan secara serta merta.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Sedangkan tipe informasi pendukung konten suatu web dapat dibedakan menjadi 2 (dua) , yakni : statis dan dinamis.

Hasil pemetaan ketentuan Permendiknas No 50 tahun 2011 terhadap konten informasi pada situs Kopertis 6 ([www.kopertis6.or.id](http://www.kopertis6.or.id)) serta jenis tipe informasi tersaji dalam tabel 3

**Tabel 3. Peta Informasi Layanan Publik Kopertis Wilayah VI**

No	Pasal	Ayat	Huruf	Point	Tipe Informasi	Situs Kopertis Wilayah VI
1	13	(1)	a	1	Statis	A6, A3, A5
2	13	(1)	a	2	Statis	A4, E
3	13	(1)	a	3	Statis	-
4	13	(1)	b	1	Statis	-
5	13	(1)	b	2	Statis	-
6	13	(1)	b	3	Statis	-
7	13	(1)	b	4	Statis	-

No	Pasal	Ayat	Huruf	Point	Tipe Informasi	Situs Kopertis Wilayah VI
8	13	(1)	b	5	Statis	-
9	13	(1)	b	6	Statis	-
10	13	(1)	b	7	Statis	B5, B6, Q1, Q9, S1, S2
11	13	(1)	b	8	Statis	A1
12	13	(1)	b	9	Statis	-
13	13	(1)	c		Statis	-
14	13	(1)	d	1	Statis	-
15	13	(1)	d	2	Statis	-
16	13	(1)	d	3	Statis	-
17	13	(1)	d	4	Statis	-
18	13	(1)	e	1	Dinamis	-
19	13	(1)	e	2	Statis	-
20	13	(1)	e	3	Dinamis	-
21	13	(1)	e	4	Dinamis	-
22	13	(1)	f	1	Statis	B1
23	13	(1)	f	2	Statis	A1, B1
24	13	(1)	g		Statis	-
25	13	(1)	h		Dinamis	-
26	13	(1)	i		Dinamis	A1
27	13	(1)	j		Statis	-
28	13	(2)	a		Dinamis	-
29	14	(1)			Dinamis	A1
30	15				Statis	O1, O2, O3, O4, O5
31	15	(1)	b		Statis	-
32	15	(1)	c		Statis	-
33	15	(1)	d		Statis	B1, P1, P2, P3, P4
34	15	(1)	e		Statis	-
35	15	(1)	f		Statis	-
36	15	(1)	g		Dinamis	-
37	15	(1)	h		Statis	-
38	15	(1)	i		Statis	-
39	15	(1)	j		Statis	-
40	15	(1)	k		Statis	G, H, M1, M2, M3, O5, S
41	15	(1)	l		Statis	-
42	15	(1)	m		Statis	-
43	15	(1)	n		Statis	A1
44	15	(1)	o		Statis	O1, O2, O3, O4, O5, Q1
45	15	(1)	p		Statis	-
46	15	(2)	a		Statis	-
47	15	(3)	b		Statis	-
48	15	(3)			Statis	-
49	15	(3)	c		Statis	O1, O2, O3, O4, O5
50	15	(3)	d		Statis	O1, O2, O3, O4, O5
51	15	(3)	e		Statis	O1, O2, O3, O4, O5
52	15	(3)	f		Statis	O1, O2, O3, O4, O5
53	15	(4)	a		Statis	-
54	15	(4)	b		Statis	-
55	15	(4)	c		Statis	-
56	15	(4)	d		Statis	-
57	15	(4)	e		Statis	-
58	15	(4)	f		Dinamis	-

Dari hasil pemetaan isi situs Kopertis Wilayah 6 dengan ketentuan UU 14/2008 yang diatur lebih lanjut dalam Permendiknas No 50 tahun 2011 didapat kesimpulan bahwa dari 58 item informasi publik yang harus disediakan, ternyata hanya terdapat 17 item yang tersedia (29 %) sehingga masih terdapat 71 % item informasi publik yang belum tersedia.

### 3.2.2 Layanan Informasi Publik

Pemanfaatan situs sebagai sarana untuk menyediakan layanan informasi publik tentunya harus mengacu pada Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 10 ayat (2) yang berbunyi : Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. Data pemohon informasi publik sekurang-kurangnya adalah : identitas pemohon, jenis dan tujuan penggunaan informasi serta jenis permohonan apakah cukup melihat atau mendapatkan salinan. Sedangkan jawaban badan publik terhadap pemohon informasi publik, sekurang-kurangnya mencantumkan : jawaban terhadap permintaan, waktu pemberian informasi serta biaya dan cara pembayaran informasi publik. Berikut ini adalah kondisi layanan informasi publik pada situs Kopertis Wilayah 6 berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**Tabel 4. Kondisi Layanan Informasi Publik Berdasarkan Perkominfo No.1/2010**

No	Fitur Situs Kopertis Wilayah VI	Tersedia	
		Ya	Tidak
1	Menu permohonan informasi public		√
2	Identitas pemohon informasi publik		√
3	Jenis dan tujuan penggunaan informasi		√
4	Jenis permohonan (lihat/salinan)		√
5	Jawaban terhadap permintaan		√
6	Waktu pemberian informasi		√
7	Biaya dan cara pembayaran informasi publik		√

## 4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari 58 item informasi publik yang harus disediakan, ternyata hanya terdapat 17 item yang tersedia (29 %) sehingga masih terdapat 71 % item informasi publik yang belum tersedia.
2. Sifat situs [www.kopertis6.or.id](http://www.kopertis6.or.id) dalam memberikan layanan informasi publik masih sebatas menampilkan, namun belum memberikan layanan yang bersifat interaktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Banciu, Diona., (2009), “*e-Romania-A Citizens’ Gateway towards Public Information*”. National Institute for Research and Development in Informatics – ICI. Bucharest
- Chan, Lau, Pan, (2008) ,“*E-government implementation: A macro analysis of Singapore's e-government initiatives*”
- Date, CJ., (1995), *An Introduction to Database System*, Vol 1 7 th Edition, Addison Wesley.
- Effendi, Sofian., (2009),“Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintahan Yang Responsif, Efisien, Efektif”, Makalah pada Seminar Nasional Reformasi Birokrasi, Jakarta.
- Heng, Wang & Jinchang, Hou., (2010), “*An Integrated Approach to Developing a Successful one-stop Portal e-Government*”, Paper in Computer Science ang Information Technology IEEE International Conference, Chengdu.
- Sutanta, E., (2011), “Model Integrasi Database Penduduk Indonesia Dengan Berbagai Sistem Informasi Berbasis Komputer”, Jurnal Informatika.
- Sutrisno, Ashari & Istiyanto, Jazi Eko, (2009), “Portal-Portal e-Government Terbaik Di Dunia”, Proceeding pada Seminar Nasional Informatika 2009, UPN “Veteran”, Yogyakarta.
- United Nations, (2012), “*E-Government Survey 2012 : E-Government for the People*”.  
<http://www.unpan.org/e-government>, Viewed April, 2012
- ,(2011), Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2011 Tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

-----, (2010), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta.

-----, (2008), Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta.